KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Audit Hambalang: KPK Diminta Tuntaskan Penyidikan
Tanggal : Rabu, 14 November 2012
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

AUDIT HAMBALANG

KPK Diminta Tuntaskan Penyidikan

JAKARTA, KOMPAS — Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, diusulkan untuk diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK diminta untuk menuntaskan penyidikan karena sudah ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 243,66 miliar.

Penyerahan hasil audit BPK kepada KPK menjadi salah satu rekomendasi yang akan disampaikan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu (14/11). Ketua BAKN DPR Sumarjati Arjoso mengatakan, BAKN sudah menyelesaikan penelaahan hasil audit BPK terkait proyek Hambalang.

BAKN telah memutuskan sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Salah satunya yakni menyerahkan hasil audit BPK kepada KPK untuk ditindaklanjuti melalui proses hukum. Pasalnya, BPK menemukan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp 243,66 miliar dalam proyek Hambalang.

"Kami akan meminta pimpinan DPR ke KPK karena indikasi kerugian negara sudah ada," katanya saat dihubungi kemarin.

Dalam laporan hasil audit, BPK memang menyebutkan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp 243,66 miliar. Indikasi kerugian negara itu berasal dari selisih pembayaran uang muka pekerjaan konstruksi yang sudah dilaksanakan sebesar Rp 116,93 miliar dan kelebihan harga pelaksanaan konstruksi sebesar Rp 126,734 miliar.

Selain itu, menurut anggota BAKN dari Fraksi PAN Teguh Juwarno, BAKN juga merumuskan rekomendasi agar status panitia kerja Hambalang Komisi X ditingkatkan menjadi panitia khusus (pansus) lintas komisi. Melalui pansus itu, DPR diusulkan menggunakan hak interpelasi atau hak bertanya pada Presiden.

Kemarin di Jakarta, peneliti hukum Indonesia Corruption Watch, Febri Diansyah, mengharapkan KPK segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hambalang.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, KPK sengaja tak mau buru-buru menetapkan tersangka baru dalam kasus Hambalang meskipun telah ada sejumlah bukti dan petunjuk yang mengarah keterlibatan seseorang.

Menurut Busyro, fakta terjadinya tindak pidana dalam kasus korupsi Hambalang masih butuh bukti yang cermat.

Busyro mengakui, tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi, seperti dalam pemberian mobil mewah kepada seseorang untuk memuluskan proyek Hambalang, tidak bisa dilihat hanya sebagai kasus yang berdiri sendiri. (NTA/BIL/RIZ)